

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek/tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD

yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraph kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Tahun 2023 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2022 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Bakesbangpol Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Bakesbangpol Kota Blitar;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2023, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja

Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2023 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2023.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2023 juga berpedoman pada Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2023.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2023. Sedangkan RKA Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2023 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2023 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Entang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010;
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
26. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
27. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun 2023 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2023 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan.
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2022
2.1	Evaluasi Hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat
BAB III	Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
BAB IV	Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Lokasi, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
BAB V	Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Blitar tahun lalu (2021) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2022) dengan mengacu pada APBD tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Bakesbangpol Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2021 (n-2) dan tahun 2022 (n-1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022 (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Resntra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah									
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,85	88,6	88,6	88,61	100,01%	88,65	88,65	100%
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun (RENSTRA, PK, RENAKSI, PROBIS, SOP, RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA, GENDER)	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	11 dokumen	11 dokumen	183,3%
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, Evaluasi RKPD, Pengukuran kinerja tribulan, monev tribulan, SPIP, ZI)	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100%	9 dokumen	9 dokumen	112,5%

RENCANA KERJA TAHUN 2023

8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan	21 ASN	21 ASN	21 ASN	21 ASN	100%	21 ASN	21 ASN	100%
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	3 event	3 event	3 event	100%	4 event	4 event	100%
		Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	75%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	c	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 komponen	7 komponen	6 komponen	6 komponen	100%	6 komponen	6 komponen	100%
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (TERMASUK MEBELAIR)						1 jenis	1 jenis	100%
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	28 jenis	26 jenis	28 jenis	28 jenis	100%	28 jenis	28 jenis	100%
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1020 dos	607 dos	1020 dos	1744 dos	170,98%	1020 dos	1020 dos	100%
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis	32 jenis	43 jenis	43 jenis	100%	43 jenis	43 jenis	100%
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	8 cetakan	17 cetakan	8 cetakan	8 cetakan	100%	8 cetakan	8 cetakan	100%
		Jumlah lembar penggandaan	28473 lembar	24655 lembar	28473 lembar	28473 lembar	100%	28473 lembar	28473 lembar	100%
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	3 bahan bacaan	3 bahan bacaan	3 bahan bacaan	100%	3 bahan bacaan	3 bahan bacaan	100%
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	45 rakor	29 rakor	45 rakor	40 rakor	88,8%	45 rakor	45 rakor	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2023

8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk Listrik, air, telepon, internet)	3 rekening	3 rekening	3 rekening	3 rekening	100%	3 rekening	3 rekening	100%
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan, jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan (bagi OPD yang mempunyai tenaga outsourcing)	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%
		Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia						5 orang	5 orang	100%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	4 unit	8 unit	4 unit	4 unit	100%	5 unit	5 unit	125%
		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan perizinannya	14 unit	13 unit	14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	100%
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Fax)	6 jenis	3 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara (termasuk pengecatan)	180 m2	1864 m2	180 m2	180 m2	100%	1 unit	1 unit	100%
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	3 jenis	5 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase tertanganinya kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%			
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%			
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan tangguh bencana	5 kelurahan	17 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	100%	21 kelurahan	21 kelurahan	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2023

		Jumlah peserta pembekalan pencegahan dini penanggulangan bencana alam	150 orang	225 orang	150 orang	116 orang	77,3%	370 orang	370 orang	100%
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi PUSDALOPS PB dan penanganan kejadian	160 orang	224 orang	160 orang	39 orang	24,4%	250 orang	250 orang	100%
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga yang memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana kebencanaan	2 jenis	19 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rehab rekon kebencanaan	100 orang	60 orang	100 orang	24 orang	24%	170 orang	170 orang	100%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan penyakit masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%			
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase penanganan penyakit masyarakat yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%			
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1. Jumlah Fasilitasi Tim SATLAK pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)	100 orang	2 kali	100 orang	100 orang	100%	3 kali	3 kali	100%
		2. Hibah BNK	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%
		3. Jumlah peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan miras dan narkoba	100 orang	0	100 orang	100 orang	100%	75 orang	75 orang	100%
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	1. Jumlah Fasilitasi Tim Terpadu penanganan konflik sosial	200 orang	0	200 orang	40 orang	20%	4 kali	4 kali	100%
		2. Hibah POLRI	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%
		3. Hibah TNI	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2023

	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4. Jumlah fasilitas pengamanan kegiatan daerah, keagamaan, tamu VVIP	3 posko	3 posko	3 posko	2 posko	66,6%	3 posko	3 posko	100%
		5. Jumlah petugas yang melaksanakan fasilitas pencegahan penanganan konflik	2300 orang	4740 orang	2830 orang	2691 orang	95,1%	1288 orang	1288 orang	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			
8.01.06.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik yang terdeteksi ditangani dan terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%			
8.01.06.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Jumlah fasilitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	400 orang	95 orang	200 orang	0	0%			
		2. Jumlah peserta rakor tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah	50 orang	50 orang	50 orang	45 orang	90%	90 orang	90 orang	100%
		3. Jumlah peserta rapat koordinasi FKDM Kota	140 orang	0	140 orang	70 orang	50%	4 kali	4 kali	100%
8.01.06.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Jumlah laporan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing di Kota Blitar	3 laporan	0	3 laporan	0	0%	1 laporan	1 laporan	100%
		2. Jumlah peserta sosialisasi penguatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing	300 orang	0	300 orang	300 orang	100%			

RENCANA KERJA TAHUN 2023

8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penduduk usia 14 - 59 Tahun yang mengikuti wawasan kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%			
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila	95%	95%	95%	95%	95%			
		Persentase peserta yang mengikuti pembinaan Karakter Kebangsaan	95%	95%	95%	95%	95%			
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Jumlah peserta desiminasi dan dialog Kerukunan Umat Bergama dan Pembauran Kebangsaan (FPK)	350 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
		2. Jumlah fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	38 orang	250 orang	38 orang	38 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
		3. Jumlah peserta diklat bela negara	100 orang	0	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
		4. Jumlah peserta pusat pendidikan wasbang (anggota korsik yang terfasilitasi, panitia pawai, undangan upacara Hari Bela Negara)	350 orang	50 orang	350 orang	350 orang	100%			
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen indeks kerukunan umat beragama	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Penduduk pemilih yang menggunakan hak pilihnya	82%	87,2%	82%	82%	100%			
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Persentase parpol yang akuntabel	75%		75%	75%	100%			

RENCANA KERJA TAHUN 2023

	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Hibah Parpol	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100%	8 lembaga	8 lembaga	100%
		2. Jumlah peserta diskusi dialog politik	960 orang	0	810 orang	674 orang	83%			
		3. Jumlah peserta peningkatan partisipasi masyarakat	1200 orang	2110 orang	1200 orang	0	0%	200 orang	200 orang	100%
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah fasilitas pengukuran IDI	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas/ orpol yang dibina sesuai aturan	80%	70%	80%	88,8%	111%			
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas aktif	75%	0	75%	87,56%	116,1%			
8.01.04.2.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan Organisasi msyarakat dan pemberdayaan organisasi masyarakat	500 orang	0	340 orang	220 orang	61%	120 orang	120 orang	100%

Tabel. 2.1.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022 (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan tahun 2022 – Sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah									
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A					A	A	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,65					88,65	88,65	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%					100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun (RENSTRA, PK, RENAKSI, PROBIS, SOP, RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA, GENDER)	11 dokumen					11 dokumen	11 dokumen	100%
Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	0					0	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, Evaluasi RKPD, Pengukuran kinerja tribulan, monev tribulan, SPIP, ZI)	9 dokumen					9 dokumen	9 dokumen	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%					100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan	21 ASN					21 ASN	21 ASN	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2023

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	5 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%					100%	100%	100%
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event					4 event	4 event	100%
	Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	3 jenis					3 jenis	3 jenis	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%					100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 komponen					6 komponen	6 komponen	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (TERMASUK MEBELAIR)	1 jenis					1 jenis	1 jenis	100%
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	0					0	0	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	28 jenis					28 jenis	28 jenis	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1020 dos					1020 dos	1020 dos	100%
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis					43 jenis	43 jenis	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	8 cetakan					8 cetakan	8 cetakan	100%
	Jumlah lembar penggandaan	28473 lembar					28473 lembar	28473 lembar	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan					3 bahan bacaan	3 bahan bacaan	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	45 rakor					45 rakor	45 rakor	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%					100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk Listrik, air, telepon, internet)	3 rekening					3 rekening	3 rekening	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan, jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan (bagi OPD yang mempunyai tenaga	12 kali					12 kali	12 kali	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2023

	outsourcing)								
	Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	5 orang					5 orang	5 orang	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%					100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	14 unit					14 unit	14 unit	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	5 unit					5 unit	5 unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Fax)	6 jenis					6 jenis	6 jenis	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara (termasuk pengecatan)	1 unit					1 unit	1 unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	3 jenis					3 jenis	3 jenis	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	76%					76%	76%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	85%					85%	85%	100%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1. Jumlah Rapat koordinasi Tim SATLAK pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)	3 kali					3 kali	3 kali	100%
	2. Jumlah peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan miras dan narkoba	75 orang					75 orang	75 orang	100%
	3. Jumlah Rapat koordinasi Tim Terpadu penanganan konflik sosial	4 kali					4 kali	4 kali	100%
	4. Jumlah posko pengamanan kegiatan daerah	3 posko					3 posko	3 posko	100%
	5. Jumlah petugas yang membantu pengamanan pencegahan penanganan konflik	1288 orang					1288 orang	1288 orang	100%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah	3 lembaga					3 lembaga	3 lembaga	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2023

Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan monev Recana Aksi P4GN	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100%
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100%					100%	100%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%					100%	100%	100%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Jumlah peserta rakor tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah	90 orang					90 orang	90 orang	100%
	2. Jumlah rapat koordinasi FKDM Kota	4 kali					4 kali	4 kali	100%
	3. Jumlah rapat koordinasi tim terpadu anti radikalisme	0					0	0	100%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Jumlah laporan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing di Kota Blitar	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100%
	2. Jumlah Lembaga pengaman pemilu yang mendapatkan hibah	0					0	0	100%
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penyelesaian konflik keagamaan	100%					100%	100%	100%
	Persentase kampung berkarakter Pancasila	9,5%					9,5%	9,5%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	81%					81%	81%	100%
	Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	3 kampung					3 kampung	3 kampung	100%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Jumlah peserta pembinaan ideologi Pancasila	200 orang					200 orang	200 orang	100%
	2. Jumlah peserta talkshow Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	100 orang					100 orang	100 orang	100%
	3. Jumlahpeserta dialog Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	100 orang					100 orang	100 orang	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2023

	4. Jumlah peserta diklat bela negara	100 orang					100 orang	100 orang	100%
	5. Jumlah anggota korsik yang terfasilitasi	50 orang					50 orang	50 orang	100%
	6. Jumlah even yang menunjang pembinaan wawasan kebangsaan	2 event					2 event	2 event	100%
	7. Jumlah pembentukan dan pendampingan Kampung berkarakter Pancasila	3 kampung					3 kampung	3 kampung	100%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Jumlah dokumen indeks kerukunan umat beragama	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100%
	2. Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah	2 lembaga					2 lembaga	2 lembaga	100%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100%					100%	100%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	81%					81%	81%	100%
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1. Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	200 orang					200 orang	200 orang	100%
	2. Jumlah tim desk pemilu yang terfasilitasi	0					0	0	100%
	3. Jumlah petugas pemantau pemilu yang terfasilitasi	0					0	0	100%
	4. Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung pemilu yang terfasilitasi	0					0	0	100%
	5. Jumlah lembaga penyelenggara pemilu yang mendapatkan hibah	0					0	0	100%
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	1. Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan politik	15 parpol					15 parpol	15 parpol	100%
	2. Jumlah peserta pendidikan politik	120 orang					120 orang	120 orang	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2023

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3. Jumlah peserta peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik	150 orang					150 orang	150 orang	100%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Jumlah dokumen IDI yg tersusun	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100%
	2. Jumlah peserta peningkatan kualitas demokrasi	40 orang					40 orang	40 orang	100%
	3. Jumlah penerima hibah parpol	8 parpol					8 parpol	8 parpol	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	65%					65%	65%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	120 ormas					120 ormas	120 ormas	100%
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Jumlah Peserta pembinaan dan pengawasan ormas	120 orang					120 orang	120 orang	100%
	2. Jumlah peserta Pengelolaan sistem informasi ormas	120 orang					120 orang	120 orang	100%
	3. Jumlah ormas yang mengikuti pemberdayaan ormas	30 ormas					30 ormas	30 ormas	100%

Program/kegiatan tahun 2021 **ada beberapa yang tidak memenuhi** target hal ini disebabkan situasi pandemi, berikut tabel persentase realisasi anggaran:

NO	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81,15
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	99,75
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99,68
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79,03
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78,98
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92,21
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	92,21
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93,13
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89,21
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	98,80
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98,75
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	86,59
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79,51
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	100
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,03
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	84,83
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	84,83
2.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	83,20
2.1.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	95,97
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	89,98

3.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	89,98
3.1.1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	89,54
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	92,88
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	60,69
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	60,69
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60,69
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	94,30
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	94,30
5.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	99,22
5.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	92,95
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	48,85
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	48,85
6.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	39,23

6.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	82,11
7.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	73,89
7.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	59,20
7.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	88,40
7.1.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	34,91
7.2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	81,58
7.2.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	81,58
7.3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	19
7.3.1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	19

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

- a. Struktur Organisasi Bakesbangpol yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Mekanisme kerja Bakesbangpol yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
- c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Bakesbangpol, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
- e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

- a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai bidang Bakesbangpol.

- b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses penciptaan daerah yang kondusif komprehensif dan berkelanjutan.
- c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat.
- d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses penciptaan yang kondusif.
- e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan pusat yang sering kali berubah karena perkembangan politik.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2021 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PBD
KOTA BLITAR

No.	Indikator	Target Renstra PD					Realisasi Capaian				
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Prosentase kejadian SARA yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase konflik Social yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase kelurahan tangguh bencana	25%	35 %	45 %	60%	80%	23,8 %	38 %	47,6 %	80,9 %	100 %
4	Persentase ormas dan orpol yang terdaftar	72%	74 %	76 %	78%	80%	72,19%	73,19 %	73,98 %	74,6 %	88,8%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bakesbangpol Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Keterlambatan laporan potensi kejadian SARA dan konflik social yang diterima;
2. Tidak adanya kewajiban ormas mendaftarkan keberadaannya kepada Bakesbangpol;
3. Pemberian layanan rekomendasi kepada masyarakat kurang didukung oleh SDM yang kompeten;
4. Belum optimalnya peran aktif Jejaring Panca Mandala untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Renja Bakesbangpol berdasarkan RKPD Kota Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se- Kota Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Bakesbangpol Kota Blitar.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA BLITAR

Nama PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Indikator Sasaran:			A (84,97)							
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (88,7)							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		4.512.327.999	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,7 indeks	3,781,672,529	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	51.800.629	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	51,800,629	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	8.234.028	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	8,234,028	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	43.566.601	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	43,566,601	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	2.846.027.829	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 %	2,849,627,829	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	2.837.736.828	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,841,336,828	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	5	8.291.001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	5 Laporan	8,291,001	

RENCANA KERJA TAHUN 2023

	Triwulanan/ Semesteran SKPD		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Triwulanan/ Semesteran SKPD		SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	140.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	100 %	98,265,401	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	30,375,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19	90.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19 Orang	67,890,401	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	548.366.041	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	100 %	264,263,158	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,347,132	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16,708,059	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10,628,892	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	31.513.980	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31,513,980	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	45.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35,817,595	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24	7.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7,800,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	354.052.061	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	150,447,500	

RENCANA KERJA TAHUN 2023

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	200.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	103,745,412	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0						
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13	100.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	81,636,976	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	22,108,436	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	246.133.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	246,133,500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	45.433.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	45,433,500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	200.700.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	200,700,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	480.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	167,836,600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	125.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	72,893,400	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	30.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	6,323,400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	22,839,800	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0						
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	175.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	56,780,000	

RENCANA KERJA TAHUN 2023

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	9,000,000	
			Indikator Tujuan :	83,7							
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)								
			Indikator Sasaran:	100							
			Persentase kejadian SARA tertangani	100							
			Persentase konflik sosial tertangani	80,2							
			Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	100							
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase penyelesaian konflik keagamaan		655.171.545	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase Kampung Berkarakter Pancasila	9,5 persen	544,976,784	
			Persentase kampung berkarakter Pancasila	9,5				Persentase penyelesaian konflik keagamaan	100 %		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	82	655.171.545	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	82 %		
			Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	2				Jumlah Pembentukan Kampung Berkarater Pancasila	5 kampung	544,976,784	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	230.171.545	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	142,017,884	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	375.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	375,000,000	

RENCANA KERJA TAHUN 2023

	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100	50.000.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	27,958,900	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100	784.593.679	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase Partai Politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	2,242,706,865	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	82	784.593.679	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	82 %	2,242,706,865	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500	139.378.042	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	139,378,042	

RENCANA KERJA TAHUN 2023

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	66.965.281	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	25,078,467	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9	578.250.356	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Laporan	2,078,250,356	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	68	173.250.500	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	68 %	28,883,107	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	120	173.250.500	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang aktif	125 ormas	28,883,107	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150	173.250.500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	28,883,107	

RENCANA KERJA TAHUN 2023

	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	77	1.540.744.580	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	77 %	281,569,384	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	87	1.540.744.580	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase masyarakat yang mengikuti soisalisasi	87 %	281,569,384	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250	840.744.580	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 Orang	81,569,384	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	700.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	200,000,000	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100	172.757.025	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	100 %	1,718,094,166	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100	172.757.025	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 %	1,718,094,166	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	1810	35.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	1810 Orang	474,812,185	

RENCANA KERJA TAHUN 2023

	Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	100.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	1,114,842,000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	37.757.025	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	128,439,981	
			TOTAL		7.838.845.328					8.597.902.835	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2023
KOTA BLITAR

No	Usulan	Pengusul	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	(UNTUK HIBAH) Kurangnya pembiayaan operasional lembaga, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan	POLRESTA BLITAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
2	(UNTUK HIBAH) Kurangnya pembiayaan operasional lembaga, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan	KODIM 0808	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
3	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Kota Blitar	BNK	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
4	(UNTUK HIBAH) Kurangnya dukungan terhadap lembaga yang membantu pemerintah daerah mewujudkan kerukunan antar umat beragama	FKUB	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 lembaga	Diakomodir
5	(UNTUK HIBAH) Kurangnya dukungan terhadap lembaga yang membantu pemerintah daerah mewujudkan pembauran kebangsaan	FPK	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 lembaga	Diakomodir
6	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	PPP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
7	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap	PKS	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	1 parpol	Diakomodir

	pendidikan politik masyarakat		Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
8	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	GOLKAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
9	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	PDIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
10	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	HANURA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
11	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	PKB	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
12	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	GERINDRA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
13	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	DEMOKRAT	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
14	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
15	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya	KPU KOTA BLITAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	1 lembaga	Diakomodir

	dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
16	Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait dampak narkoba dan potensi konflik sosial	Lurah Rembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	210 orang	Diakomodir dengan pelaksanaan ditingkat Kecamatan Sananwetan
17	Kurangnya informasi/kapasitas organisasi masyarakat	Lurah Rembang	-	-	Tidak Diakomodir karena Bakesbangpol akan melaksanakan di tingkat Kota
18	Menurunnya kesadaran akan wawasan kebangsaan	Lurah Kepanjenkidul	-	-	Tidak Diakomodir karena Bakesbangpol akan melaksanakan di tingkat Kota
19	Kurangnya informasi/kapasitas masyarakat dalam kewaspadaan dan pengawasan orang asing	Lurah Tanggung	-	-	Tidak Diakomodir
20	Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait dampak narkoba dan potensi konflik sosial	Lurah Tanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	210 orang	Diakomodir dengan pelaksanaan ditingkat Kecamatan Kepanjenkidul
21	Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait dampak narkoba dan potensi konflik sosial	Lurah Kepanjenkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
22	Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait dampak narkoba dan potensi konflik sosial	Lurah Karangsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	210 orang	Diakomodir dengan pelaksanaan ditingkat Kecamatan Sukorejo
23	Menurunnya kesadaran akan wawasan kebangsaan	Lurah Sentul	-		Tidak Diakomodir karena Bakesbangpol akan melaksanakan di tingkat Kota
24	Kurangnya informasi/kapasitas masyarakat dalam pendidikan politik	Lurah Sentul	-		Tidak Diakomodir karena Bakesbangpol akan melaksanakan di tingkat Kota

25	Kurangnya informasi/kapasitas masyarakat dalam pendidikan politik	Lurah Kepanjenlor	-	Tidak Diakomodir karena Bakesbangpol akan melaksanakan di tingkat Kota
----	---	-------------------	---	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kota Blitar yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri sedangkan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. pelaksanaan evaluasi politik;
- d. penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan; dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan
- f. Pengkoordinasian kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
- i. pelaksanaan pendataan, penyusunan kebijakan dan pembinaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- j. pelaksanaan pendataan, analisa, pembuatan kajian, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- l. pelaksanaan analisa guna peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan faslitasi penanganan konflik sosial;
- m. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- n. penyusunan kebijakan penanganan SARA dan konflik sosial di Kota Blitar;
- o. perumusan kebijakan peningkatan keaktifan organisasi masyarakat dan organisasi politik di Kota Blitar;
- p. penyusunan kebijakan indeks kapasitas daerah;
- q. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan kesatuan bangsa dan politik;
- r. perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;

- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan;
- v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Renja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Bakesbangpol Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama

Tabel 3.2.1
Indikator Tujuan dan Formula perhitungan
(Renstra 2016 - 2021)

INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	Target	Realisasi	Target	
		2020		2021	2022
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Rumus Indeks	80	84,30	80	83,6

Tabel 3.2.2
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan
(Renstra 2021 - 2026)

INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	Target	Realisasi	Target	
		2020		2021	2022
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Rumus Indeks	80	84,30	80	83,6

Tabel 3.2.3
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2021
(Renstra 2016 - 2021)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
			2021	
1	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Prosentase kejadian SARA yang tertangani	100 %	100 %
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase konflik sosial yang tertangani	100 %	100 %
3	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	80%	100 %
4	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan partai politik	Persentase ormas dan orpol yang terdaftar	80 %	88,8 %

Tabel. 3.2.4
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2022
(Renstra 2021 – 2026)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			2022
1	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Persentase Kejadian SARA Tertangani	100%
		Persentase konflik sosial tertangani	100%
		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,1%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana kerja (Renja) dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Bakesbangpol Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PAGU

INDIKATIF TAHUN 2023

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Lokasi
Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Persentase Kejadian SARA Tertangani	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	544.976.784	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	544.976.784	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	142.017.884	
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	375.000.000	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	27.958.900	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	281.569.384	
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	281.569.384	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	81.569.384	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200.000.000	
	Persentase konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.224.529.485	BIDANG KEWASPADAN

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Lokasi
	tertangani	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.224.529.485	NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	474.812.185	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.114.842.000	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	128.439.981	
	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.242.706.865	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	139.378.042	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.078.467	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.078.250.356	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.242.706.865	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.883.107	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.883.107	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	28.883.107	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.781.672.529	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.800.629	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.234.028	
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.781.672.529	SEKRETARIAT
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.800.629	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.234.028	

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Lokasi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.566.601	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.849.627.829	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.841.336.828	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.291.001	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.265.401	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.375.000	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67.890.401	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.263.158	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11.347.132	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.708.059	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.628.892	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.513.980	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.817.595	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.447.500	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.745.412	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		Pengadaan Mebel	81.636.976	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.108.436	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
		Pengadaan Aset Tak Berwujud		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.133.500	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.433.500	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.700.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.836.600	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.893.400	
		Pemeliharaan Mebel	6.323.400	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.839.800	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.780.000	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	
		TOTAL	8.597.902.835	

Rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA BLITAR

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelom- pok Sasar- an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu- ng Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8,597,902,835						7,536,724,676		
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,7 ind eks	3,781,672,529						88,7 indeks	4,101,724,676	
8	1	1	2 .0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	51,800,629						100 %	54,390,655	
8	1	1	2 .0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Doku men	8,234,028	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	masya rakat	12 Doku men	8,645,724	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 .0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Lapor an	43,566,601	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	masya rakat	20 Lapor an	45,744,931	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA KERJA TAHUN 2023

8	1	1	2 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 %	2,849,627,829					100 %	3,008,705,551		
8	1	1	2 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Oran g/bulan	2,841,336,828	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	Peran gkat daera h	19 Oran g/bulan	3,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	5 Lapora n	8,291,001	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	Peran gkat daera h	5 Lapora n	8,705,551	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	100 %	98,265,401						100 %	110,000,000	
8	1	1	2 0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	30,375,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	Pegaw ai	2 paket	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19 Oran g	67,890,401	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	Pegaw ai	19 Oran g	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat darah sesuai standart	100 %	264,263,158						100 %	338,190,000	
8	1	1	2 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,347,132	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	Peran gkat Daera h	1 Paket	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA KERJA TAHUN 2023

8	1	1	2 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16,708,059	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	Peran gkat Daerah	3 Paket	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10,628,892	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	Peran gkat Daerah	2 Paket	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31,513,980	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	Peran gkat Daerah	12 Paket	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35,817,595	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	Peran gkat Daerah	1 Paket	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7,800,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	Peran gkat Daerah	24 Dokumen	8,190,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	150,447,500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	Peran gkat Daerah	40 Laporan	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	103,745,412						100 %	120,000,000	
8	1	1	2 0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	81,636,976	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	OPD	13 Unit	90,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA KERJA TAHUN 2023

8	1	1	2 0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	22,108,436	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	OPD	4 Unit	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	246,133,500						100 %	298,900,400	
8	1	1	2 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	45,433,500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	OPD	36 Laporan	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	200,700,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	OPD	13 Laporan	248,900,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	167,836,600						100 %	171,538,070	
8	1	1	2 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	72,893,400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	OPD	10 Unit	76,538,070	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	6,323,400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	OPD	8 Unit	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	22,839,800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	OPD	69 Unit	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA KERJA TAHUN 2023

8	1	1	2 0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	56,780,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	OPD	2 Unit	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2 0 9	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	9,000,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	OPD	1 Unit	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kampung Berkarakter Pancasila	9,5 persen	544,976,784						9,5 persen	825,000,000	
						Persentase penyelesaian konflik keagamaan	100 %							100 %		
8	1	2	2 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pembentukan Kampung Berkarater Pancasila	5 kampung	544,976,784						5 kampung	825,000,000	
						Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	82 %							82 %		
8	1	2	2 0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	142,017,884	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	masyarakat	100 Orang	300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	2 0 1	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	375,000,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		masyarakat	3 Laporan	375,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA KERJA TAHUN 2023

8	1	2	2 0 1	6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	27,958,900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	masyarakat	100 Keluarga	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	2,242,706,865						100 %	800,000,000	
8	1	3	2 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	82 %	2,242,706,865						82 %	800,000,000	

RENCANA KERJA TAHUN 2023

8	1	3	2 . 0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	139,378,042	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	masyarakat	500 Orang	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2 . 0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	25,078,467	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	masyarakat	100 Orang	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2 . 0 1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Laporan	2,078,250,356	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	masyarakat	11 Laporan	600,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA KERJA TAHUN 2023

8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	68 %	28,883,107						68 %	35,000,000	
8	1	4	2 . 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang aktif	125 or mas	28,883,107						125 or mas	35,000,000	
8	1	4	2 . 0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Ora ng	28,883,107	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	Ormas	150 Ora ng	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	77 %	281,569,384						77 %	450,000,000	
8	1	5	2 . 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti soisalisasi	87 %	281,569,384						87 %	450,000,000	
8	1	5	2 . 0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 Ora ng	81,569,384	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaan	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	masya rakat	250 Ora ng	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA KERJA TAHUN 2023

8	1	5	2 0 1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	200,000,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	masyarakat	1 Laporan	300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	100 %	1,718,094,166						100 %	1,325,000,000	
8	1	6	2 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 %	1,718,094,166						100 %	1,325,000,000	
8	1	6	2 0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1810 Orang	474,812,185	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	masyarakat	1810 Orang	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA KERJA TAHUN 2023

8	1	6	2 . 0 1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	1,114,842,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	masyarakat	2 Laporan	1,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2 . 0 1	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	128,439,981		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis	masyarakat	1 Dokumen	125,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, difokuskan pada:

1. Mengoptimalkan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama dengan Meningkatkan Koordinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram dengan melakukan mediasi/rembug kepada masyarakat dalam menangani Konflik sosial/masyarakat yang terjadi/muncul dan bekerjasama dengan instansi terkait
3. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik Dengan melaksanakan Sosialisasi aplikasi data base organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

BAB V

PENUTUP

Mengingat dari uraian-uraian seperti tersebut pada bab-bab yang lalu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bakesbangpol merupakan Badan komponen daerah yang mengemban tugas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah (Walikota) dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Dalam pelaksanaan tugas harus berpedoman pada Renja Bakesbangpol Tahun 2023 yang aktivitasnya sesuai dengan rincian kegiatan dan realisasi kegiatan dengan tolok ukur aktualitas yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan.
3. Dalam melaksanakan tugas semua jajaran terkait berupaya mengoptimalkan pencapaian hasil dengan semaksimal mungkin sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat pada saat ini.
4. Untuk merespon perkembangan tuntutan dan dinamika masyarakat Kota Blitar di era reformasi dan pelaksanaan otonomi Daerah, maka segala sesuatu yang menyangkut dengan aplikasi Renja Tahun 2023 di peruntukkan pada peningkatan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga pada gilirannya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat akan semakin terwujud lebih tepat sasaran.

Saran-saran yang diberikan dari penyusunan perubahan Renja tahun 2023 Bakesbangpol sebagai berikut:

1. Mengingat betapa strategis tugas dan fungsi Bakesbangpol dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bakesbangpol, maka sangat mengharapkan dukungan sesama pihak dari instansi terkait untuk saling mengembangkan jaringan komunikasi, koordinasi dan informasi yang lebih intensif.
2. Pada jajaran Bakesbangpol dapat melaksanakan visi dan misi Walikota periode 2022-2026.
3. Agar terwujudnya Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Bakesbangpol maka kepada pihak yang berwenang memperhatikan dan

mengupayakan tindak lanjut terhadap kegiatan- kegiatan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dan mendapatkan perhatian atas kesediaan dana sebagai pendukung tercapainya kinerja untuk mencapai sasaran sesuai Renstra OPD 2022 – 2026.

4. Perlunya dukungan dana untuk pengembangan Jejaring Panca Mandala yang baru terbentuk.

Blitar, 4 Agustus 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar



TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 196612041996031004

